



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 100.4.2 – 5091 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2025**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perlu melakukan kompilasi harmonisasi dan sinkronisasi materi terhadap usulan rencana penyusunan produk hukum di Kementerian Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1601), sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 900);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2025.
- KESATU : Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Prosundagri Tahun 2025, dengan jumlah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) rancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Prosundagri Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- 6 (enam) Rancangan Peraturan Pemerintah;
 - 2 (dua) Rancangan Peraturan Presiden; dan
 - 19 (sembilan belas) Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- KETIGA : Prosundagri Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dan ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Prosundagri Tahun 2025 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Unit Kerja pemrakarsa dengan Direktorat/Pusat/Biro penanggungjawab menyampaikan jadwal pembahasan paling lambat pada tanggal 10 Januari 2025.
- KEENAM : Unit Kerja pemrakarsa dengan Direktorat/Pusat/Biro penanggungjawab menyampaikan laporan setiap triwulan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan Prosundagri Tahun 2025 kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

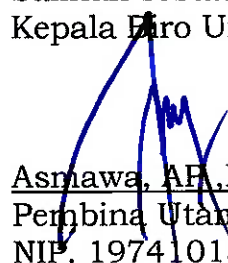
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN


Asmawa, A.F., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19741015 199311 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 100.4.2 – 5091 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN
2025

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2025

I. SEKRETARIAT JENDERAL								
A. BIRO PERENCANAAN								
No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian /Pelaksanaan	Keterangan	Penanggungjawab /Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2026	✓		Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) PP 19 Tahun 2022	Tahunan	Bagian Perencanaan Program	B11
2.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029	✓		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional		Bagian Perencanaan Program	B07

B. PUSAT PENERANGAN :

No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian /Pelaksanaan	Keterangan	Penanggungjawab /Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa		✓	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi	B11

Keterangan

RUU : -

RPP :

RPerpres :

RPMDN : 3 (tiga)

II. DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian /Pelaksanaan	Keterangan	Penanggungjawab /Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Pedoman Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah		✓			Direktorat Kewaspadaan Nasional	B12

Keterangan

RUU : -

RPP : -

RPerpres : -

RPMDN : 1 (satu)

III. DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN								
No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian/ Pelaksanaan	Keterangan	Penanggungjawab /Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rancangan Peraturan Pemerintah	Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus	✓		Pasal 360 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		Direktorat Kawasan Perkotaan dan Batas Negara	B09
2.	Rancangan Peraturan Pemerintah	Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Buton Utara Dari Buranga Kecamatan Bonegunu ke Kulisusu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara	✓				Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	B06
3.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	✓		Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		Subdit GWPP, Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kecamatan	B09
4.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/ Wali kota kepada Camat	✓		Pasal 11 ayat (9) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan		Subdit GWPP, Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kecamatan	B09

Keterangan RUU : - RPP : 2 (dua) RPerpres : - RPMDN : 2 (dua)								
IV. DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH								
No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian /Pelaksanaan	Keterangan	Penanggungjawab /Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rancangan Peraturan Pemerintah	Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua		✓			Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah	B12
2.	Rancangan Peraturan Pemerintah	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Aglomerasi	✓		Pasal 60 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta		Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah	B12
3.	Rancangan Peraturan Presiden	Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Kawasan Aglomerasi dan Tata Cara Penunjukan Dewan Kawasan Aglomerasi	✓		Pasal 60 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah		Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah	B12

					Khusus Jakarta			
4.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah	✓				Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah	B12
Keterangan RUU : - RPP : 2 (dua) RPerpres : 1 (satu) RPMDN : 1 (satu)								
V. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH								
No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian /Pelaksanaan	Keterangan	Penanggungjawab /Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	✓			Tahunan	Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah	B07
Keterangan RUU : - RPP : - RPerpres : - RPMDN : 1 (satu)								

VI. DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian /Pelaksanaan	Keterangan	Penanggungjawab /Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rancangan Peraturan Pemerintah	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah		✓		Kebutuhan Perubahan atas Peraturan Pemerintah	Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	B11
2.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026	✓		Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	Tahunan	Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah	B06
3.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Pedoman Tata Cara Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2025	✓		Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009	Tahunan	Direktorat Pendapatan Daerah	B06

Keterangan

RUU : -

RPP : 1 (satu)

RPerpres : -

RPM¹DN : 2 (dua)

VIII. INSPEKTORAT JENDERAL

No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian /Pelaksanaan	Keterangan	Penanggungjawab /Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rancangan Peraturan Pemerintah	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					Bagian Perencanaan dan Perundang-Undangan	
2.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2026					Bagian Perencanaan dan Perundang-Undangan	

Keterangan

RUU : -

RPP : 1 (satu)

RPerpres : -

RPMDN : 1 (satu)

IX. BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

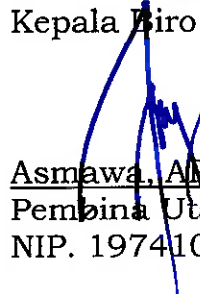
No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian /Pelaksanaan	Keterangan	Penanggungjawab /Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	✓		Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang	Mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016	Sekretariat BSKDN	B11

					Kementerian Dalam Negeri			
2.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah		✓		Perubahan instrumen penilaian	Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum, dan Pemdagri	B11
3.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		✓		Perubahan instrumen penilaian	Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa	B11
4.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah		✓		Menambah pengaturan pembinaan inovasi daerah	Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, TI, dan Inovasi Pemdagri	B11
5.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah	✓				Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik	B11
Keterangan RUU : - RPP : - RPerpres : - RPMDN : 5 (lima)								

X. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Jenis	Tentang	Status		Pendelegasian /Pelaksanaan	Keterangan	Penanggungjawab /Pemrakarsa	Target Penyelesaian
			Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri <i>Corporate University</i>	✓		Pelaksanaan Pasal 203 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS		1. Sekretaris BPSDM Kemendagri 2. Kepala Pusat Standarisasi dan Sertifikasi	B08
Keterangan RUU : - RPP : - RPerpres : - RPMDN : 1 (satu)								

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum


Asmawa, A.P., M.Si
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19741015 199311 1 003

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN